

KEMISKINAN RUMAH TANGGA PERDESAAN LAHAN KERING PERKEBUNAN

Adi Setiyanto

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi, yang artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor (World Bank, 2000). Oleh karenanya, kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional, dan menurut Ellis (1998a, 1998b, 2000, 2001, 2002, 2004) dimensi kemiskinan menyangkut berbagai aspek, di antaranya adalah ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (1) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat; (2) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumber daya yang tersedia; dan (3) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.

Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu tujuan pembangunan pertanian. Hasil pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi untuk menjangkau umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian ke depan. Evaluasi tersebut perlu dilakukan pada lingkup makro maupun mikro di mana pada lingkup makro difokuskan pada dinamika kemiskinan perdesaan secara nasional, sedangkan mikro kemiskinan di tingkat desa dan pada tingkat rumah tangga petani yang merupakan pelaku utama usaha pertanian.

Makalah ini secara umum bertujuan untuk membahas dinamika kemiskinan pertanian secara makro pada lingkup nasional dan secara mikro pada lingkup rumah tangga petani. Secara khusus penulisan makalah ini membahas dinamika kemiskinan rumah tangga lahan kering perkebunan. Keluaran yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah dinamika kemiskinan perdesaan secara makro periode 2007–2013 dan dinamika kemiskinan pada rumah tangga lahan kering perdesaan

berdasarkan data Patanas tahun 2009 dan 2012, serta rumusan alternatif kebijakan pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani berdasarkan kedua hasil analisis tersebut.

METODE ANALISIS

Kerangka Pemikiran dan Pendekatan

Telah banyak publikasi tentang pengertian dan definisi umum kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat. Menurut BPS (2011a) dan Bappenas (2004), hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang tersebut antara lain hak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan juga memiliki pengertian kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai standar hidup yang layak yang disebabkan oleh faktor tertentu. Menurut Ismawan (2003), penyebab kemiskinan dan keterbelakangan terjadi karena persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan tidak adanya akses maka manusia menghadapi keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian, penduduk miskin mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan. Akibatnya, potensi penduduk miskin untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Adanya keterbelakangan sumber daya manusia (produktivitas), kurangnya modal, dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan penduduk miskin sulit untuk keluar dari kemiskinan. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang nantinya akan berakibat pada kurangnya modal, dan begitu seterusnya.

Kemiskinan memiliki ukuran dan batasan tertentu. BPS menggunakan ukuran yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk seseorang. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara dengan 2.100 kkal per hari) dan nonmakanan (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan). Patokan kecukupan 2.100 kkal ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk. Ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan dan penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. Konsep yang digunakan oleh Bank Dunia pada dasarnya sama dengan yang digunakan BPS, yang membedakan keduanya adalah garis kemiskinan yang digunakan. Garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia dalam dolar *purchasing power parity* (PPP) atau paritas daya beli, di mana dalam prakteknya ada dua ukuran yang digunakan yakni 1,25 dolar dan 2 dolar. Dolar PPP atau biasa

disebut dolar internasional tidak sama dengan *dollar currency* (dolar AS). Karena Bank Dunia membutuhkan data kemiskinan yang *comparable* (dapat diperbandingkan) antarnegara, maka digunakanlah garis kemiskinan dalam dolar internasional atau dolar PPP.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia (BPS, 2009). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis, GK dibangun dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Komoditas penting bagi penduduk miskin adalah beras. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan adalah sebesar 25,06% di perkotaan dan 34,67% di perdesaan (BPS, 2009).

Menurut Harniati (2007), fenomena kemiskinan perdesaan dan pertanian di Indonesia menunjukkan adanya kaitan antara faktor spasial dan sektor usaha mayoritas penduduknya. Terdapat hubungan erat antara kerentanan penduduk terhadap kemiskinan dengan ekosistem di mana ia tinggal atau dengan kata lain tingkat kemiskinan berbeda antaragroekosistem. Tingkat kemiskinan penduduk di agroekosistem dataran tinggi, lahan basah, dan lahan kering serta pantai/pesisir di bawah angka kemiskinan nasional. Namun, jumlah rumah tangga miskin di lahan kering dan di dataran tinggi jauh lebih besar daripada di lahan basah dan di pesisir. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi menggunakan suatu pola umum (*one fits for all*), tetapi perlu mengembangkan berbagai model yang spesifik sesuai karakteristik kemiskinan di berbagai agroekosistem.

Data dan Analisis Data

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder lingkup nasional dan provinsi, serta data sekunder lingkup desa contoh dan data primer lingkup rumah tangga contoh. Data sekunder diperlukan untuk analisis dinamika sosial ekonomi pertanian pada lingkup nasional dan provinsi contoh dan data tersebut dikumpulkan dari instansi terkait, sedangkan data primer lingkup rumah tangga dan lingkup lembaga agribisnis merupakan data survei Patanas yang telah dilakukan oleh PSEKP pada tahun-tahun 2009 dan 2012 pada agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan.

Analisis yang akan dilakukan untuk aspek kemiskinan rumah tangga meliputi (1) insiden kemiskinan yang akan menganalisis besaran *headcount index* (HI), *poverty gap index* (PGI), dan *poverty severity index* (PSI) dan (2) indikator kemiskinan di wilayah perdesaan yang dilakukan rumah tangga untuk mengatasi kemiskinan. Persentase penduduk miskin dihitung dengan mengacu kepada metode BPS, yaitu dengan membandingkan besaran pengeluaran per kapita dengan garis batas kemiskinan yang disusun oleh BPS untuk wilayah perdesaan. Dengan

menggunakan metode yang sama maka hasil kajian ini akan dapat melengkapi informasi tingkat kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten yang dikeluarkan oleh BPS.

Analisis dalam penelitian ini akan mencakup (a) analisis perubahan antarwaktu (dinamika) dan (b) analisis parameter. Analisis perubahan antarwaktu menurut tipe desa disesuaikan dengan ketersediaan data rumah tangga yang dikumpulkan melalui kegiatan Patanas selama tahun 2009 dan 2012. Aspek sosial ekonomi rumah tangga yang dianalisis meliputi insiden kemiskinan. Analisis parameter dilakukan untuk mengetahui besaran dari variabel/indikator tertentu yang telah ditetapkan. Analisis data tingkat kemiskinan dilakukan dengan menggunakan formula *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT). Adapun formula indeks kemiskinan FGT dinyatakan sebagai berikut (Cockburn, 2001):

$$P_{\alpha}(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha} \quad (\alpha \geq 0) \quad (1)$$

di mana: y_i = rata-rata nilai pengeluaran per kapita individu ke-i dalam rumah tangga yang sudah diranking berdasarkan tingkat pengeluaran
 n = total populasi
 q = jumlah populasi
 z = batas kemiskinan

sehingga *poverty gap ratio* adalah:

$$G_i = (z - y_i)/z, \text{ di mana } G_i = 0 \text{ pada saat } y_i > z \quad (2)$$

Nilai α ada tiga macam, yaitu:

1. Jika $\alpha = 0$, P_0 menyatakan *headcount index*, merupakan proporsi populasi yang berada di bawah garis kemiskinan, formula di atas akan menjadi:

$$P_0(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^0, \text{ atau } P_0 = q/n \quad (3)$$

2. Jika $\alpha = 1$, menunjukkan ukuran *poverty gap ratio* di mana masing-masing penduduk miskin dibobot berdasarkan jarak relatif mereka dari garis kemiskinan, Formula (2) menjadi:

$$P_1 = 1/n \sum (z - y_i)/z \quad (4)$$

Misalnya, besaran $P_1 = 0,2$ artinya total kesenjangan kemiskinan seluruh populasi miskin terhadap garis kemiskinan adalah 20%, sedangkan $P_1/P_0 = 1/q \sum (z - y_i)/z$ adalah rata-rata kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) yang dinyatakan sebagai proporsi terhadap garis kemiskinan.

3. Jika $\alpha = 2$, Formula (2) menjadi:

$$P_2(y; z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^2 \quad (5)$$

Indeks tersebut merupakan ukuran yang sensitif terhadap perubahan pendapatan atau distribusi pendapatan populasi miskin (*distributionally sensitive index*), ukuran ini dinamakan rasio 'keparahan' kemiskinan (*poverty severity*).

Indeks Gini digunakan sebagai indikator ketimpangan pendapatan rumah tangga sebagai akibat ketidakmerataan aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber daya ekonomi. Analisis distribusi pendapatan rumah tangga dilakukan dengan menghitung indeks Gini dengan rumus sebagai berikut (Glewwe, 1986; Adams *et al.*, 1995):

$$G(y) = \frac{2}{\bar{y}} \text{Cov}(y_i, p(y_i)) \quad (6)$$

- di mana: $G(y)$ = indeks Gini distribusi pendapatan rumah tangga
 \bar{y} = rata-rata pendapatan rumah tangga
 y_i = total pendapatan rumah tangga ke- i
 $p(y_i)$ = urutan pendapatan rumah tangga, yaitu $p = 1$ untuk urutan rumah tangga dengan total pendapatan terkecil dan $p = n$ untuk urutan rumah tangga dengan total pendapatan tertinggi
 n = jumlah populasi rumah tangga yang dianalisis

Nilai G berada pada selang 0 dan 1. Distribusi pendapatan rumah tangga masuk kategori ketimpangan berat apabila $G > 0,5$; kategori ketimpangan sedang apabila $0,4 < G < 0,5$; dan kategori ketimpangan ringan apabila $G < 0,4$.

DINAMIKA KEMISKINAN AGREGAT NASIONAL

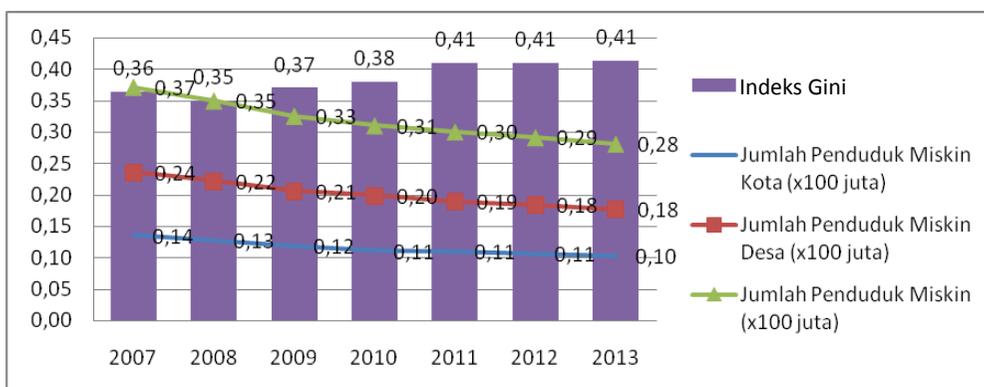
Penduduk Miskin dan Indeks Gini

Data kemiskinan menurut BPS (2011b) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2011 sebanyak 30,02 juta orang. Jumlah ini mengalami penurunan 1 juta orang atau 3,2% dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret tahun sebelumnya yang mencapai 31,02 juta orang. Di kawasan perkotaan persentase penduduk miskin mencapai 11,05 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin sekitar 18,94 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami penduduk perdesaan yang pada umumnya adalah petani.

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan BPS tahun 2007–2013 (BPS, 2014a), jumlah penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan lebih tinggi dari sisi jumlah, namun lebih rendah dari sisi persentase. Jumlah penduduk miskin perdesaan menunjukkan penurunan rata-rata 4,64 persen per tahun atau 0,98 juta per tahun, atau secara persentase mengalami penurunan 1,01 persen per tahun (5,68% per tahun) dengan nilai perubahan garis kemiskinan rata-rata meningkat Rp17,74 ribu per tahun (9,57% per tahun). Hal ini

menunjukkan bahwa sumber penurunan jumlah penduduk miskin lebih banyak di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sektor pertanian yang identik dengan perdesaan seharusnya ditempatkan menjadi fokus pembangunan.

Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun demikian indeks Gini meningkat (Gambar 2). Kebijakan pembangunan pemerintah yang *pro-job*, *pro-poor*, *pro-growth* dan *pro-environment* tidak berjalan dengan baik. Dalam kata lain, upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak berhasil. Sektor pertanian dan wilayah perdesaan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan belum menjadi prioritas dan andalan dalam pembangunan. Terdapat kecenderungan bahwa penurunan jumlah penduduk di perkotaan lebih banyak bersifat alamiah, sementara di perdesaan berjalan tanpa keberpihakan lebih tinggi dari pemerintah. Dalam arti lain, orang kaya didorong (jika tidak terdorong) tetap mejadi lebih kaya, sementara penduduk miskin bekerja keras untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi.



Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

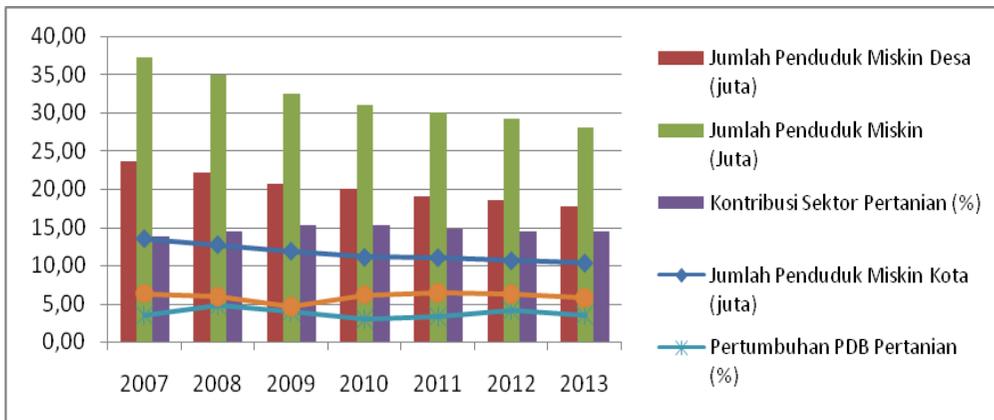
Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Gini di Indonesia, 2007–2013

Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi

Bukti bahwa penurunan jumlah penduduk miskin sangat terkait dengan pertumbuhan sektor pertanian dan wilayah perdesaan, ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1. Sektor pertanian identik dengan wilayah perdesaan. Fokus dan konsentrasi pembangunan di wilayah perdesaan dan sektor pertanian memiliki peran besar di dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hal ini, sektor pertanian dan wilayah perdesaan seharusnya menjadi fokus utama dalam pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Gambar 2 dan Tabel 1 dapat diketahui bahwa semakin tinggi perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, maka semakin tinggi pula perubahan penurunan penduduk miskin perdesaan dan jumlah penduduk miskin total. Di samping itu, semakin tinggi perubahan pertumbuhan ekonomi pertanian

tahun sebelumnya akan semakin tinggi penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan dan jumlah penduduk miskin nasional. Namun demikian, pola ini tidak terjadi apabila melihat perubahan jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan maupun nasional dengan perubahan pertumbuhan ekonomi atau PDB nasional. Hal ini memberikan penjelasan kenapa penurunan jumlah penduduk miskin terjadi, tetapi indeks Gini mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kontribusi di sektor nonpertanian tidak memberikan kontribusi nyata di dalam penurunan jumlah penduduk miskin dan pemerataan, justru menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi.



Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

Gambar 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2007–2013

Tabel 1 memberikan penjelasan bahwa hingga tahun 2010 perubahan berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDB sektor pertanian memiliki peran besar dalam penurunan jumlah penduduk miskin di sektor pertanian, namun tidak di sektor nonpertanian maupun secara nasional. Hal ini semakin menjelaskan arah perubahan yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin lebih diperankan oleh sektor pertanian dari pada nonpertanian. Dengan demikian, pembangunan pertanian harus semakin fokus kepada peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan mempertahankan peran atau kontribusi pertanian dalam perekonomian.

Penduduk Miskin dan Pendapatan per Kapita

Peningkatan pendapatan per kapita baik secara riil (harga konstan 2000) maupun berdasarkan harga berlaku nampaknya tidak seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Tabel 2 memberikan penjelasan di mana peningkatan pendapatan per kapita pertanian senilai rata-rata Rp0,34 juta per kapita per tahun (harga konstan) atau meningkat rata-rata 4,76% per tahun dan Rp3,29 juta per kapita per tahun (harga berlaku) atau 18,40% per tahun lebih mendorong

penurunan jumlah penduduk miskin jika dibandingkan sektor nonpertanian yang memiliki rata-rata peningkatan pendapatan lebih tinggi baik dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Tabel 1. Perkembangan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Perubahan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDB (%)	Perubahan Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian (%)	Perubahan Pertumbuhan PDB (%)
2007	-0,93	-1,20	-2,13	0,75	0,11	0,85
2008	-0,79	-1,42	-2,21	0,76	1,36	-0,34
2009	-0,86	-1,57	-2,43	0,81	-0,87	-1,38
2010	-0,81	-0,69	-1,51	0,00	-0,95	1,59
2011	-0,05	-0,96	-1,00	-0,58	0,36	0,27
2012	-0,40	-0,48	-0,89	-0,21	0,83	-0,23
2013	-0,32	-0,75	-1,06	-0,07	-0,66	-0,48

Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

Data pada Tabel 2 juga memberikan gambaran bahwa pada tahun 2007 dan 2008 perbandingan antara nilai pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku dibandingkan pendapatan per kapita harga konstan di sektor nonpertanian lebih tinggi sedangkan di sektor pertanian lebih rendah, namun sejak tahun 2009 terjadi sebaliknya di mana perbandingan antara nilai pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku dibandingkan pendapatan per kapita harga konstan di sektor nonpertanian lebih rendah sedangkan di sektor pertanian lebih tinggi. Pada tahun 2007 nilai perbandingan pada sektor nonpertanian adalah 2,20 (Rp57,60 juta dibanding Rp26,19 juta) dan nilai perbandingan sektor pertanian adalah 2,00 (Rp12.70 juta dibanding Rp6,36 juta). Pada tahun 2008 nilai perbandingannya adalah sektor nonpertanian 2,56 dan pertanian 2,52, pertanian masih lebih rendah. Namun demikian, sejak 2009 terjadi perubahan di mana nilai perbandingan di sektor nonpertanian lebih rendah yaitu 2,73 dan di sektor pertanian lebih tinggi yaitu 2,90. Hal tersebut terus berjalan hingga tahun 2013 di mana pada sektor nonpertanian 3,38 dan sektor pertanian 3,86. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi di sektor pertanian lebih tinggi jika dibandingkan sektor nonpertanian dan memberikan gambaran tingginya ketimpangan pendapatan antara sektor pertanian dan nonpertanian.

Sementara itu, Tabel 3 memberikan penjelasan bahwa hingga tahun 2011 perubahan peningkatan pendapatan per kapita per tahun sebelumnya sejalan dengan besarnya penurunan jumlah penduduk miskin di sektor pertanian, namun tidak di sektor nonpertanian maupun secara nasional. Data juga menjelaskan jumlah penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan semakin rendah dan juga memberikan fenomena bahwa penduduk miskin di perdesaan berkecukupan di antara

garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang bekerja di perdesaan (sektor pertanian) penurunan jumlahnya tidak sebanding dengan penurunan pangsa PDB pertanian, sementara sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang relatif rendah. Padahal, sektor pertanian memiliki peran yang relatif lebih besar dalam menurunkan angka kemiskinan, jika dibandingkan sektor nonpertanian.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Pendapatan per Kapita di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Pendapatan per Kapita Harga Konstan (Rp juta/kap/thn)			Pendapatan per Kapita Harga Berlaku (Rp juta/kap/thn)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Nonpertanian	Pertanian	Total	Nonpertanian	Pertanian	Total
2007	13,56	23,61	37,17	26,19	6,36	17,89	57,60	12,70	38,79
2008	12,77	22,19	34,96	26,83	6,63	18,54	68,61	16,68	47,29
2009	11,91	20,62	32,53	27,40	6,80	19,02	74,75	19,69	52,36
2010	11,10	19,93	31,02	28,13	7,05	19,81	82,32	22,79	58,83
2011	11,05	18,97	30,02	29,09	8,05	21,47	91,67	27,88	68,59
2012	10,65	18,49	29,13	29,46	8,22	21,96	96,26	29,89	72,82
2013	10,33	17,74	28,07	31,24	8,67	23,39	105,70	33,43	80,56
R1	-0,54	-0,98	-1,52	0,81	0,34	0,86	7,73	3,29	6,64
R2	-4,41	-4,64	-4,56	2,90	4,76	4,35	10,85	18,40	13,18

Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing

R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

Tabel 2 dan Tabel 3 semakin menjelaskan arah perubahan yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin lebih diperankan oleh sektor pertanian dari pada nonpertanian, dan tingginya nilai pendapatan per kapita nonpertanian dan perubahan-perubahannya makin mendorong terjadinya ketimpangan sehingga angka indeks Gini makin meningkat. Berdasarkan fakta bahwa perubahan terjadi sejak 2009 (Tabel 2) dan 2011 (Tabel 3), maka dalam pembangunan pertanian ke depan harus diberikan ruang yang lebih besar dalam mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, pembangunan pertanian harus semakin fokus kepada peningkatan pertumbuhan sektor pertanian.

Penduduk Miskin dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 4 memberikan gambaran bahwa peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja pertanian dan produktivitas ekonominya akan memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di perdesaan maupun secara nasional. Setiap penurunan jumlah 1 orang tenaga kerja pertanian akan berdampak penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,72 orang. Setiap penurunan tenaga kerja pertanian sebanyak 1% akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 5,80 orang. Sementara itu, pada sektor nonpertanian setiap peningkatan kerja satu orang akan menurunkan jumlah

penduduk miskin 0,22 orang, dan setiap peningkatan penyerapan tenaga kerja 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin 1,13%.

Tabel 3. Perkembangan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Pendapatan per Kapita di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta)	Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Nonpertanian		Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta)	Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Pertanian		Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Pertumbuhan Pendapatan per Kapita	
		Harga Konstan (%)	Harga Berlaku (%)		Harga Konstan (%)	Harga Berlaku (%)		Harga Konstan (%)	Harga Berlaku (%)
2007	-0,93	2,35	11,61	-1,20	1,15	22,28	-2,13	2,92	13,86
2008	-0,79	2,44	19,12	-1,42	4,11	31,34	-2,21	3,63	21,92
2009	-0,86	2,12	8,95	-1,57	2,58	18,02	-2,43	2,62	10,72
2010	-0,81	2,67	10,12	-0,69	3,71	15,75	-1,51	4,15	12,35
2011	-0,05	3,40	11,37	-0,96	14,20	22,36	-1,00	8,39	16,60
2012	-0,40	1,30	5,01	-0,48	2,17	7,21	-0,89	2,27	6,16
2013	-0,32	6,01	9,80	-0,75	5,39	11,82	-1,06	6,49	10,63

Sumber: BPS (2014a, 2014b), diolah

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tenaga Kerja di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang)			Jumlah Tenaga Kerja (Juta orang)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Nonpertanian	Pertanian	Total
2007	13,56	23,61	37,17	59,19	42,67	101,85
2008	12,77	22,19	34,96	61,68	42,96	104,64
2009	11,91	20,62	32,53	63,53	43,54	107,07
2010	11,10	19,93	31,02	66,35	43,24	109,59
2011	11,05	18,97	30,02	69,02	39,14	108,17
2012	10,65	18,49	29,13	73,09	39,92	113,01
2013	10,33	17,74	28,07	73,54	39,22	112,76
R1	-0,54	-0,98	-1,52	2,46	-0,36	2,11
R2	-4,41	-4,64	-4,56	3,90	-0,80	2,04

Sumber: BPS (2014a), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing

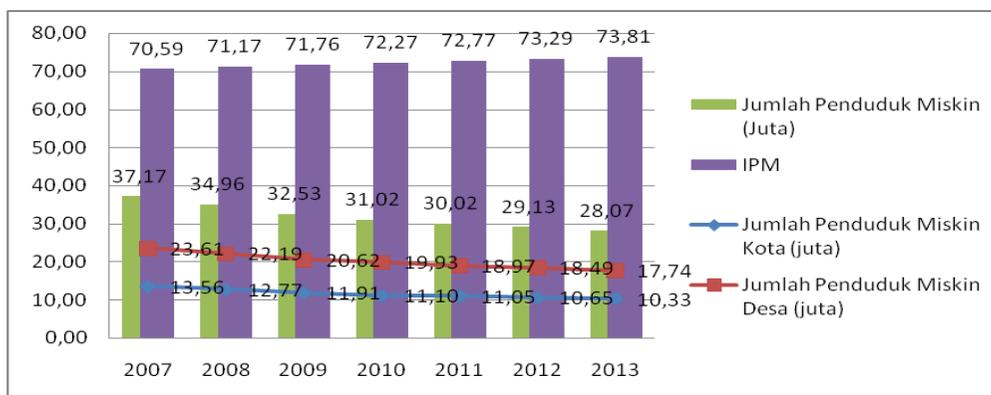
R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

Pada tingkat nasional peningkatan jumlah tenaga kerja satu orang akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,72 orang, sedangkan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin 2,22%. Data pada Tabel 4 juga memberikan gambaran bahwa sektor pertanian kelebihan beban tenaga kerja, sehingga upaya untuk memperluas skala usaha pertanian dan atau pengurangan angkatan kerja akan berdampak besar terhadap

penurunan jumlah penduduk miskin. Mengingat fenomena bahwa penduduk miskin di perdesaan berkuat di antara garis kemiskinan, perluasan skala usaha perlu disertai dengan distribusi dan pemerataan dalam penguasaan aset dan sumber daya. Inovasi teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan kesempatan berusaha di perdesaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung kebijakan distribusi dan pemerataan dalam penguasaan aset dan sumber daya menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk dilakukan.

Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan peningkatan dari 70,59 pada tahun 2007 menjadi 73,81 pada tahun 2013 (Gambar 3). Seiring dengan peningkatan IPM, jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS (2014a), diolah

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan IPM di Indonesia, 2007–2013

Tabel 5 menunjukkan bahwa perubahan IPM sebesar satu-satuan akan terkait dengan penurunan jumlah penduduk miskin 3,03 juta orang, di mana penurunan di perkotaan hanya 1,12 juta orang sementara di perdesaan mencapai 1,91 juta orang. Hal ini menunjukkan arah peningkatan kualitas SDM manusia dengan peningkatan IPM di perdesaan menjadi kunci di dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Perkembangan Rumah Tangga dan Tenaga Kerja Miskin Pertanian

Di Indonesia kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di perdesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. Hasil analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk dan tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor-sektor lainnya. Jumlah rumah tangga miskin di sektor pertanian (dalam arti sempit)

disajikan pada Tabel 6. Sementara itu, jumlah tenaga kerja atau jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama disajikan pada Tabel 7.

Tabel 5. Perkembangan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin dan IPM di Indonesia, 2007–2013

Tahun	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Perubahan IPM
2007	-0,93	-1,20	-2,13	0,49
2008	-0,79	-1,42	-2,21	0,58
2009	-0,86	-1,57	-2,43	0,59
2010	-0,81	-0,69	-1,51	0,51
2011	-0,05	-0,96	-1,00	0,50
2012	-0,40	-0,48	-0,89	0,52
2013	-0,32	-0,75	-1,06	0,52
R1	-0,59	-1,01	-1,60	0,53
R2	-4,69	-4,67	-4,68	0,74

Sumber: BPS (2014a), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing

R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh gambaran bahwa jumlah rumah tangga miskin tanaman pangan menurun rata-rata 0,10 juta atau 4,62% per tahun. Sementara itu, pada subsektor hortikultura, perkebunan, dan total sektor pertanian (dalam arti sempit) jumlah rumah tangga miskin masing-masing menurun 0,01 juta, 0,03 juta dan 0,13 juta atau 4,91%, 3,18% dan 4,15% per tahun. Terdapat fenomena yang menarik, jika pada subsektor lain menunjukkan penurunan maka pada subsektor peternakan justru menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga miskin rata-rata 9,66% per tahun. Sekalipun demikian, jika dilihat pada Tabel 7 jumlah tenaga kerja miskin menunjukkan penurunan 0,11 juta orang atau 6,66% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan peternakan telah gagal menurunkan jumlah rumah tangga miskin sekalipun pada tenaga kerja yang bekerja pada usaha peternakan mengalami penurunan.

Pada subsektor tanaman pangan jumlah tenaga kerja miskin menurun rata-rata 0,59 juta orang atau 5,47% per tahun, sementara pada subsektor hortikultura mengalami penurunan rata-rata 0,07 juta atau 6,60% per tahun dan pada subsektor perkebunan rata-rata menurun 0,15 juta atau 3,68% per tahun. Jumlah tenaga kerja miskin pertanian menurun rata-rata 0,93 juta atau 5,41% per tahun. Subsektor perkebunan memiliki jumlah tenaga kerja miskin terbesar kedua setelah tanaman pangan dan memiliki penurunan jumlah tenaga kerja miskin paling rendah.

Tabel 6. Perkembangan Rumah Tangga Miskin Sektor Pertanian di Indonesia, 2007–2013 (Juta Rumah Tangga)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian Sempit
2007	2,30	0,20	0,75	0,16	3,41
2008	2,17	0,20	0,69	0,13	3,18
2009	2,08	0,19	0,64	0,10	3,01
2010	2,04	0,16	0,78	0,25	3,22
2011	2,04	0,17	0,71	0,21	3,13
2012	1,82	0,14	0,67	0,19	2,82
2013	1,72	0,15	0,60	0,15	2,62
R1	-0,10	-0,01	-0,03	0,00	-0,13
R2	-4,62	-4,91	-3,18	9,66	-4,15

Sumber: BPS (2014a), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing

R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Miskin Sektor Pertanian di Indonesia, 2007–2013 (Juta Orang)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian Sempit
2007	12,33	1,20	4,23	1,78	19,54
2008	11,53	1,10	4,05	1,61	18,29
2009	10,64	0,99	3,82	1,45	16,90
2010	10,08	0,79	4,11	1,09	16,07
2011	9,57	0,91	3,41	1,33	15,22
2012	9,26	0,83	3,42	1,20	14,71
2013	8,79	0,77	3,32	1,10	13,99
R1	-0,59	-0,07	-0,15	-0,11	-0,93
R2	-5,47	-6,60	-3,68	-6,66	-5,41

Sumber: BPS (2014a), diolah

Keterangan: R1 = Rata-rata perubahan absolut sesuai satuan data masing-masing

R2 = Rata-rata perubahan per tahun dalam % per tahun

KEMISKINAN RUMAH TANGGA LAHAN KERING PERKEBUNAN

Garis Kemiskinan 2009 dan 2012

Berdasarkan data BPS (2014a), garis kemiskinan berkembang dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan merupakan ukuran "relatif" dan akan selalu berkembang sesuai dengan rata-rata pendapatan suatu negara. Garis kemiskinan ini berlaku pada setiap negara dan kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Perkembangan garis kemiskinan

nasional pada tahun 2009 (Maret) dan 2012 (Maret) terus meningkat dan ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Garis Kemiskinan Provinsi Contoh Patanas dan Nasional, 2009 dan 2012 (Rp per Kapita per Bulan)

Provinsi	2009			2012		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Jambi	244.516	178.107	199.623	311.311	236.165	259.257
Jatim	202.624	174.628	188.317	245.305	222.216	233.202
Kalbar	194.881	166.815	174.617	243.957	218.476	226.175
Sulsel	177.872	142.241	153.715	210.217	179.160	190.545
Nasional	222.123	179.835	200.262	267.408	229.226	248.707

Sumber: BPS (2014a)

Insiden Kemiskinan 2009 dan 2012

Insiden kemiskinan dapat diketahui dengan menghitung *headcount index* (HI) berdasarkan formula Foster-Greer-Thorbecke (FGT). HI menghasilkan berapa banyak penduduk miskin di wilayah tersebut (yang dinyatakan dengan persen), namun tidak dapat diketahui seberapa parah kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Namun demikian, HI tidak dapat menunjukkan kedalaman dan keparahan kemiskinan sehingga perlu dihitung PGI (indeks kesenjangan kemiskinan atau kedalaman kemiskinan P1) yang menyatakan tingkat kesenjangan rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis batas kemiskinan yang dinyatakan dalam persentase. HI maupun PGI belum menunjukkan distribusi dan seberapa parah kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu pula dilakukan perhitungan PSI untuk mengetahui hal itu. PSI (indeks keparahan kemiskinan P2) menunjukkan kondisi distribusi kemiskinan di wilayah tersebut yang dinyatakan dalam persen. Semakin besar PSI, maka kesenjangan kemiskinan antarpenduduk miskin di wilayah tersebut semakin lebar. Hasil analisis insiden kemiskinan pada provinsi contoh Patanas dibandingkan analisis BPS Provinsi dan Nasional 2009 dan 2012 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 menunjukkan bahwa secara umum hasil analisis HI terjadi penurunan insiden kemiskinan selama 2009–2012 kecuali di Jawa Timur untuk Kabupaten Lumajang dan Sanggau untuk Kalimantan Barat. Pada saat yang sama, hasil analisis data BPS Provinsi menunjukkan penurunan, sementara di kedua kabupaten tersebut meningkat. Insiden kemiskinan di kedua kabupaten tersebut masih di bawah provinsi dan di Kabupaten Sanggau sekalipun meningkat insiden kemiskinan relatif kecil. Berbeda dengan di Kabupaten Sanggau, di Kabupaten Lumajang insiden kemiskinan cenderung meningkat dan tinggi, yaitu dari 12,50% tahun 2009 meningkat menjadi 15,00% pada tahun 2012. Peningkatan insiden kemiskinan di Kabupaten Lumajang terjadi karena para petani tebu lebih banyak melakukan keputusan untuk menyewakan lahan usaha dibandingkan mengusahakan sendiri. Pada petani contoh yang tidak menyewakan lahannya, peningkatan produksi, harga,

dan nilai pendapatan usaha tidak dapat dinikmati karena tingginya ketergantungan pada bandar penjual tebu ke pabrik gula. Sekalipun terjadi peningkatan di tahun 2012 dibanding tahun 2009, responden petani tebu di desa contoh di Kabupaten Lumajang kurang menikmati kenaikan tersebut.

Tabel 9. Insiden Kemiskinan pada Provinsi Contoh Patanas Dibandingkan Analisis BPS Provinsi dan Nasional, 2009 dan 2012

Provinsi, Desa, dan Kabupaten Contoh	Komoditas	Indeks Kemiskinan (%)					
		<i>Headcount</i>		<i>Poverty Gap</i>		<i>Poverty Severity</i>	
		2009	2012	2009	2012	2009	2012
Jambi							
Penerokan-Batanghari	Karet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matra Manunggal-Muaro Jambi	Kelapa Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPS Provinsi		6,88	7,52	0,94	1,09	0,22	0,26
Jatim							
Rejosari-Malang	Tebu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kebonan-Lumajang	Tebu	12,50	15,00	4,60	1,99	3,00	0,28
BPS Provinsi		21,00	17,35	3,54	2,31	0,91	0,48
Kalbar							
Semoncol-Sanggau	Karet	2,50	5,00	0,02	0,49	0,00	0,08
Hibun-Sanggau	Kelapa Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPS Provinsi		10,09	9,11	1,68	1,23	0,45	0,25
Sulsel							
Pakeng-Pinrang	Kakao	59,00	35,90	18,00	8,69	7,50	3,29
Bakti-Luwu	Kakao	7,30	0,00	0,81	0,00	0,11	0,00
BPS Provinsi		15,81	13,46	2,74	2,21	0,74	0,59
Nasional		17,35	15,12	3,05	2,36	0,82	0,59

Sumber: Data Patanas (2009, 2012) dan BPS (2014a), diolah

Sekalipun insiden kemiskinan meningkat di Kabupaten Lumajang, PGI dan PSI, yang berarti kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin dengan garis batas kemiskinan semakin sempit dan distribusi pendapatan antarrumah tangga miskin juga semakin sempit. Pada data PGI dan PSI, searah dengan perubahan di level data BPS Provinsi Jawa Timur, namun pada HI tidak searah, di mana HI pada level provinsi menunjukkan penurunan.

Di Kabupaten Sanggau juga terlihat fenomena bahwa sekalipun insiden kemiskinannya relatif kecil dan meningkat, namun PGI dan PSI juga meningkat yang berarti kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin dengan garis batas kemiskinan semakin meningkat dan distribusi pendapatan antarrumah tangga miskin juga semakin melebar. Kondisi ini tidak searah dengan perubahan di level data BPS Provinsi Kalimantan Barat, di mana HI, PGI, dan PSI menunjukkan penurunan.

Secara umum, insiden kemiskinan di wilayah lahan kering perkebunan relatif rendah karena masih berada di bawah level data provinsi, kecuali di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Data juga menunjukkan rumah tangga dengan usaha komoditas basis karet dan kelapa sawit memiliki tingkat kemiskinan yang relatif kecil dibandingkan usaha tebu dan kakao. Tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah Pinrang menunjukkan fenomena berbeda dan menyimpang dari kondisi umum yang terjadi. Wilayah ini merupakan wilayah agroekosistem lahan kering perkebunan berbasis kakao. Di wilayah ini kakao diusahakan pada lokasi kebun yang pada umumnya berada jauh dari pemukiman dengan kebun berada di lereng pegunungan. Di samping jarak tempuh yang jauh, tingkat pemeliharaan yang sangat rendah baik pada pemupukan maupun penyemprotan hama penyakit. Di Kabupaten Pinrang tingkat serangan penggerek buah kakao (PBK) sangat tinggi dan mengakibatkan turunnya produktivitas kakao. Produktivitas kakao di Kabupaten Pinrang per tahun kurang dari 500 kg/ha, sementara di Kabupaten Luwu mencapai sekitar 900 kg/ha. Sekalipun di kedua wilayah ini produktivitas kakao masih di bawah rata-rata, namun di produktivitas kakao di Kabupaten Luwu relatif lebih tinggi dibanding di Kabupaten Pinrang.

Tabel 9 juga menunjukkan dinamika perbedaan atau variasi antarwilayah, kecuali pada komoditas kelapa sawit di mana tidak terjadi insiden kemiskinan di Kabupaten Sanggau maupun di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2009 dan 2012. Pada komoditas lain, baik karet, kakao, maupun tebu terlihat variasi dinamika antarwilayah kabupaten yang menunjukkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan karakteristik masing lokasi secara spesifik haruslah dipertimbangkan.

Distribusi Pendapatan 2009 dan 2012

Hasil analisis distribusi pendapatan menggunakan indeks Gini disajikan pada Tabel 10. Tabel tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di lokasi contoh Patanas berada dalam tingkat ketimpangan sedang hingga berat. Berbeda dengan hasil analisis pada Tabel 9 yang menunjukkan kondisi rata-rata berada di bawah level provinsi dan nasional, hasil analisis pada Tabel 10 menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dan menunjukkan perubahan yang searah dengan level provinsi maupun nasional, kecuali di Muaro Jambi dan Sanggau dengan komoditas kelapa sawit lahan kering. Di Kabupaten Muaro Jambi dan Sanggau distribusi pendapatan menunjukkan ketimpangan sedang dan ringan dan menurun dari 0,44 menjadi 0,42 di Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan di Kabupaten Sanggau menurun dari 0,36 menjadi 0,34 pada tahun 2009 dan 2012.

Berdasarkan Tabel 10, dari empat provinsi contoh hanya di Kalimantan Barat yang memiliki ketimpangan ringan, sedangkan di tiga provinsi lainnya cenderung sedang (Provinsi Jambi), sedang (Provinsi Sulawesi Selatan) dan cenderung berat (Jawa Timur). Peningkatan ketimpangan terbesar terjadi di Jawa Timur dengan nilai perubahan 0,09 di Kabupaten Malang dan 0,18 di Kabupaten Lumajang, nilai perubahan berikutnya adalah di Kabupaten Sanggau dengan komoditas karet, di Kabupaten Luwu dan Pinrang dengan komoditas kakao masing-masing 0,07, dan terendah adalah di Kabupaten Batanghari (karet) dengan nilai perubahan 0,03. Hasil

ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antarpetani pekebun di desa-desa Patanas semakin meningkat, kecuali pada desa yang berbasis komoditas kelapa sawit.

Tabel 10. Indeks Gini pada Provinsi Contoh Patanas Dibandingkan Analisis BPS Provinsi dan Nasional, 2009 dan 2012

Provinsi, Desa, dan Kabupaten Contoh	Komoditas	Tahun		Perubahan 2009–2012
		2009	2012	
Jambi				
Penerokan-Batang Hari	Karet	0,38	0,41	0,03
Matra Manunggal-Muaro Jambi	Kelapa Sawit	0,44	0,42	-0,02
Data BPS Provinsi		0,27	0,34	0,07
Jatim				
Rejosari-Malang	Tebu	0,43	0,52	0,09
Kebonan-Lumajang	Tebu	0,40	0,58	0,18
Data BPS Provinsi		0,33	0,36	0,03
Kalbar				
Semoncol-Sanggau	Karet	0,26	0,33	0,07
Hibun-Sanggau	Kelapa sawit	0,36	0,34	-0,02
Data BPS Provinsi		0,32	0,38	0,06
Sulsel				
Pakeng-Pinrang	Kakao	0,40	0,47	0,07
Bakti-Luwu	Kakao	0,42	0,49	0,07
Data BPS Provinsi		0,39	0,41	0,02
Total seluruh Provinsi-Desa Contoh		0,39	0,44	0,05
Data BPS Indonesia		0,37	0,41	0,04

Sumber: Data Primer Patanas (2009, 2012) dan BPS (2014a), diolah

Berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan antarpetani. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di antaranya adalah peningkatan produktivitas dan stabilisasi harga. Produktivitas dan harga menjadi sumber utama peningkatan pendapatan, juga sumber utama perubahan pendapatan. Di samping itu, kondisi infrastruktur yang mendorong peningkatan produktivitas dan stabilisasi harga nampaknya perlu mendapatkan perhatian penting.

Komoditas kelapa sawit memiliki kondisi infrastruktur yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan harga yang lebih terjamin stabilitasnya. Apabila kebijakan yang mendukung hal tersebut tidak dilakukan secara kondusif, maka ketimpangan akan tetap terjadi dan bahkan semakin meningkat serta pertanian nonkelapa sawit akan semakin ditinggalkan. Lebih jauh lagi rumah tangga petani akan beralih pada sumber pendapatan nonpertanian yang memberikan insentif pendapatan lebih tinggi dan risiko lebih rendah.

Tabel 11. Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Patanas pada Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan, 2009 dan 2012

Provinsi-Desa	Tahun	Satuan	Pendapatan		
			Pertanian	Nonpertanian	Total
Jambi-Penerokan	2009	Nilai (Rp Juta)	11,66	9,72	21,38
		Persentase (%)	54,53	45,47	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	36,07	18,46	54,53
		Persentase (%)	66,16	33,84	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	209,44	89,84	155,06
		Persentase (%)	11,63	-11,63	
Jambi-Matra Manunggal	2009	Nilai (Rp Juta)	20,20	11,49	31,69
		Persentase (%)	63,75	36,25	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	32,42	22,21	54,64
		Persentase (%)	59,34	40,66	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	60,51	93,40	72,43
		Persentase (%)	-4,41	4,41	
Jatim-Rejosari	2009	Nilai (Rp Juta)	4,75	9,30	14,05
		Persentase (%)	33,82	66,18	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	25,12	16,62	41,74
		Persentase (%)	60,19	39,81	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	428,50	78,69	197,01
		Persentase (%)	26,36	-26,36	
Jatim-Kebonan	2009	Nilai (Rp Juta)	5,91	5,10	11,01
		Persentase (%)	53,69	46,31	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	9,52	25,15	34,67
		Persentase (%)	27,45	72,55	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	61,03	393,49	214,98
		Persentase (%)	-26,24	26,24	
Kalbar-Semoncol	2009	Nilai (Rp Juta)	18,10	2,89	20,98
		Persentase (%)	86,24	13,76	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	24,65	8,26	32,91
		Persentase (%)	74,91	25,09	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	36,25	185,90	56,84
		Persentase (%)	-11,33	11,33	
Kalbar-Hibun	2009	Nilai (Rp Juta)	30,14	7,59	37,73
		Persentase (%)	79,88	20,12	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	67,31	7,94	75,25
		Persentase (%)	89,45	10,55	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	123,34	4,57	99,45
		Persentase (%)	9,57	-9,57	
Sulsel-Pakeng	2009	Nilai (Rp Juta)	5,93	3,19	9,12
		Persentase (%)	64,99	35,01	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	4,30	17,63	21,93
		Persentase (%)	19,59	80,41	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	-27,52	452,30	140,45
		Persentase (%)	-45,40	45,40	
Sulsel-Bakti	2009	Nilai (Rp Juta)	9,44	17,98	27,41
		Persentase (%)	34,42	65,58	100,00
	2012	Nilai (Rp Juta)	4,22	39,91	44,13
		Persentase (%)	9,56	90,44	100,00
	Perubahan	Nilai (%)	-55,29	121,99	60,97
		Persentase (%)	-24,86	24,86	

Dinamika perubahan lingkungan dan pembangunan pertanian yang terjadi dapat mengakibatkan sumber pendapatan rumah tangga berubah. Perubahan kondisi lingkungan strategis perdesaan aktivitas usaha dan perekonomian perdesaan berubah seiring dengan perubahan waktu. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, perubahan tingkat aksesibilitas atau keterbukaan ekonomi desa, perubahan iklim, dinamika harga, dan perubahan lainnya menyebabkan usaha pertanian dan usaha komoditas utama bukan lagi menjadi sumber pendapatan utama. Aktivitas ekonomi perdesaan menjadi semakin berkembang dan sumber pendapatan rumah tangga juga demikian. Karakteristik sumber daya lahan dan agroekosistem, letak geografis desa, dan akses jalan dan komunikasi yang semakin baik dan maju menyebabkan tidak dominannya sumber pendapatan dari sektor pertanian, karena sumber pendapatan yang tadinya didominasi oleh sumber pendapatan dari sektor pertanian menjadi dari nonpertanian. Petani yang berada pada kelompok pemilik lahan sempit berupaya keras memenuhi tuntutan kebutuhan rumah tangganya melalui bekerja dan berusaha sebagai buruh dan jasa nonpertanian, sementara yang memiliki lahan luas semakin meningkatkan dan memperluas usahanya ke arah usaha nonpertanian untuk memanfaatkan kelebihan sumber daya produktif yang dimilikinya dan meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Perkembangan usaha perkebunan dan peningkatan aksesibilitas desa menjadi sumber penyebab peningkatan sumber pendapatan dari usaha nonpertanian terutama di desa Patanas Sulawesi Selatan. Adanya jalan lintas Sulawesi menyebabkan kondisi desa sangat ramai dan aktivitas ekonomi menjadi berkembang dan semakin beragam. Masyarakat di wilayah ini menambah pendapatannya terutama dari sektor nonpertanian seperti berdagang, buka warung/toko dan usaha transportasi. Usaha pertanian tetap menjadi sumber pendapatan masyarakatnya, namun pendapatan dari nonpertanian lebih besar dibandingkan pertanian.

KESIMPULAN

Secara makro jumlah penduduk miskin dalam periode 2007–2013 mengalami penurunan, namun demikian indeks Gini meningkat, menunjukkan penduduk miskin perdesaan berada pada posisi di sekitar garis kemiskinan. Sektor pertanian memiliki kontribusi tinggi dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, maka semakin tinggi pula perubahan penurunan penduduk miskin perdesaan dan jumlah penduduk miskin total. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kontribusi di sektor nonpertanian tidak memberikan kontribusi nyata di dalam penurunan jumlah penduduk miskin dan pemerataan, justru menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi.

Jumlah tenaga kerja miskin pertanian menurun rata-rata 0,93 juta orang atau 5,41% per tahun dengan penurunan pada subsektor perkebunan rata-rata menurun 0,15 juta orang atau 3,68% per tahun. Subsektor perkebunan memiliki jumlah

tenaga kerja miskin terbesar kedua setelah tanaman pangan dan memiliki penurunan jumlah tenaga kerja miskin paling rendah. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pertanian menjadi kunci dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Setiap penurunan jumlah satu orang tenaga kerja pertanian akan berdampak penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,72 orang. Sementara itu, pada sektor nonpertanian setiap peningkatan kerja satu orang hanya akan menurunkan jumlah penduduk miskin 0,22 orang, dan setiap peningkatan penyerapan tenaga kerja 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin 1,13%.

Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan. Perubahan IPM sebesar satu-satuan akan terkait dengan penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan 3,03 juta orang di mana penurunan di perkotaan hanya 1,12 juta orang sementara di perdesaan mencapai 1,91 juta orang.

Secara umum, analisis mikro data Patanas 2009–2012 menunjukkan bahwa insiden kemiskinan di wilayah lahan kering perkebunan relatif rendah dan berada di bawah insiden kemiskinan tingkat provinsi, kecuali di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak terjadi insiden kemiskinan pada petani komoditas kelapa sawit baik di Kabupaten Sanggau maupun di Muaro Jambi. Pada komoditas lain baik karet, kakao, maupun tebu menunjukkan variasi dinamika antarwilayah kabupaten yang menunjukkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan karakteristik masing-masing lokasi secara spesifik haruslah dipertimbangkan.

Sekalipun insiden kemiskinan meningkat, kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin dengan garis batas kemiskinan semakin sempit dan distribusi pendapatan antarrumah tangga miskin juga semakin sempit. Pada kasus Kabupaten Lumajang, data PGI dan PSI, searah dengan perubahan di level data BPS Provinsi Jawa Timur, namun pada HI tidak searah, di mana HI pada level provinsi menunjukkan penurunan.

Pada Kabupaten Sanggau juga menunjukkan fenomena bahwa sekalipun insiden kemiskinannya relatif kecil dan meningkat, namun PGI dan PSI juga meningkat yang berarti kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin dengan garis batas kemiskinan semakin meningkat dan distribusi pendapatan antarrumah tangga miskin juga semakin melebar. Kondisi ini tidak searah dengan perubahan di level data BPS Provinsi Kalimantan Barat, di mana HI, PGI, dan PSI menunjukkan penurunan.

Berdasarkan hasil analisis indeks Gini tingkat ketimpangan pada wilayah lahan kering perkebunan berada pada kondisi sedang hingga berat dan menunjukkan peningkatan. Perubahan yang ketimpangan yang terjadi searah dengan level provinsi maupun nasional, kecuali di Kabupaten Muaro Jambi dan Sanggau dengan komoditas kelapa sawit sebagai komoditas utama yang menunjukkan penurunan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan antarpetani pekebun di desa-desa Patanas semakin meningkat, kecuali pada desa yang berbasis komoditas kelapa sawit.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan di antaranya: *Pertama*, hasil analisis data Patanas menunjukkan tingkat relevansi yang memadai untuk memantau dinamika perekonomian perdesaan. Survei Patanas selanjutnya dilanjutkan untuk memonitor dinamika rumah tangga pertanian dan perdesaan

yang tidak tergambar pada publikasi statistik. *Kedua*, peningkatan kualitas SDM manusia dengan peningkatan IPM di perdesaan menjadi kunci di dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Kebijakan peningkatan kualitas SDM pertanian baik melalui pendidikan formal maupun dengan peningkatan jumlah penyuluh, fasilitator, dan pemandu lapangan sangat penting. *Ketiga*, peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja pertanian dan produktivitas ekonominya akan memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di perdesaan maupun secara nasional. Upaya menciptakan kondisi kondusif bagi penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di perdesaan menjadi sangat penting. *Keempat*, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia lebih banyak bersumber dari wilayah perdesaan, di mana sektor pertanian (dalam arti luas) identik dengan wilayah perdesaan. Fokus dan konsentrasi pembangunan di wilayah perdesaan dan sektor pertanian memiliki peran besar di dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Kelima*, kebijakan pemerintah diharapkan semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, baik melalui penyediaan infrastruktur pertanian dan perdesaan maupun upaya untuk memperluas skala usaha pertanian. Upaya ini akan berpengaruh terhadap pengurangan angkatan kerja yang tergantung pada sektor informal dan pertanian dan akan berdampak besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams Jr., R.H. and J.J. He. 1995. Sources of Income Inequality and Poverty in Rural Pakistan. Research Report 102. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku I. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011a. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Februari 2011. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011b. Perkembangan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia. Jakarta. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1 (13 November 2014).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014b. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha. http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=11¬ab=1. (13 November 2014).
- Cockburn, J. 2002. Procedures for Conducting Non-Parametric Poverty/Distribution with DAD. CREFA, Universite Laval. <http://jcoc@ecn.ulaval.ca>.
- Ellis, F. 1998a. Survey Article: Household Strategies and Rural Livelihood Diversification. The Journal of Development Studies 35(1):1-38.

- Ellis, F. 1998b. Livelihood Diversification and Sustainable Rural Livelihoods. *In* D. Carney (Ed.). *Sustainable Rural Livelihoods: What Contribution Can We Make?* Department for International Development. London.
- Ellis, F. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press. Oxford.
- Ellis, F. 2001. *Mixing It: Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press. Oxford.
- Ellis, F. 2002. *Rural Livelihoods, Diversity and Poverty Reduction Policies: Uganda, Tanzania, Malawi and Kenya*. LADDER Working Paper No. 1, September 2001.
- Ellis, F. 2004. *Occupational Diversification in Developing Countries and Implications for Agricultural Policy*. Hot Topic Paper. Programme of Advisory and Support Services to DFID (PASS) Project No. WB0207. December 2004
- Glewwe, P., 1986. The Distribution of Income in Sri Lanka in 1969-1970 and 1980-1981: A Decomposition Analysis. *Journal of Development Economics* 24(2):255-274.
- Harniati. 2007. Program-Program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan. Materi Sekretaris Badan Pengembangan SDM Pertanian pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan. Diseminarkan tanggal 21 Agustus 2007 di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Ismawan, B. 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. The World Bank. Washington, D.C.